

**KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Lampung Post**

**Tribun Lampung**

Halaman

**Radars Lampung**

\_\_\_\_\_

9

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
	<input checked="" type="checkbox"/>												

## DD 2021 Lamsel Rp262,758 Miliar untuk 256 Desa

LAMPUNG Selatan menerima kucuran dana desa (DD) 2021 Rp262.758.029.000 untuk 256 desa. Pola pencairan masih sama dengan 2020, yakni dalam tiga tahap, pertama 40%, kedua 40%, dan ketiga 30%.

Meski demikian, belum ada satu pun desa yang mengajukan pencairan DD 2021 tersebut. "Tapi, hingga kini belum ada desa yang mengajukan pencairan tahap pertama DD 2021. Sebab, peraturan men-

teri Keuangan (PMK)-nya baru keluar kemarin," kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan, M Iqbal Fuad, Selasa (5/1).

Dia menjelaskan untuk saat ini sudah ada beberapa desa yang telah mengumpulkan laporan akhir DD 2020. "Kemungkinan mereka (pihak desa) masih menyusun Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)," ujarnya.

Penggunaan DD 2021 masih akan memprioritaskan pemulihan klaster ekonomi. Bahkan, DD tersebut masih memprogramkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa yang terbit 28 Desember 2020.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan Rohadian mengatakan berdasar pada PMK, realisasi DD untuk program BLT penyalurannya terhitung sejak Januari-Desember atau setahun penuh.

Dia menambahkan besaran BLT dari DD itu Rp300.000/bulan/KPM. "Pembagian BLT masih berlanjut untuk 2021. Tapi nilainya kini Rp300 ribu/bulan," ujarnya.

Untuk itu, Rohadian memerintahkan pemerintah desa untuk memutakhirkan data KPM supaya data penerima tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya. "Kemungkinan masih menggunakan data BLT DD yang kemarin. Tapi kami minta ada pemutakhiran atau verifikasi kembali agar mereka yang menerima benar-benar yang berhak bukan atas kepentingan," katanya. (FOR/DI)